

**IMPLIKASI HUKUM DAN KETATANEGARAAN TERHADAP
PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*
(Studi Terhadap Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024)**

SKRIPSI

Oleh

Mohamad Samsul Hadi

NIM. 05020421045



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Samsul Hadi
NIM : 05020421045
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Implikasi Hukum dan Ketatanegaraan terhadap
Penghapusan Presidential Threshold perspektif
Fiqh Siyāsah (Studi terhadap Putusan MK No.
62/PUU-XXII/2024)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 25 Agustus 2025
Saya yang menyatakan,



Mohamad Samsul Hadi
NIM. 05020421045

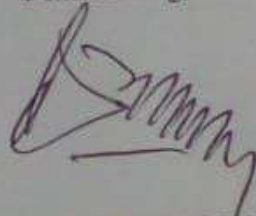
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohamad Samsul Hadi
NIM. : 05020421045
Judul : Implikasi Hukum dan Ketatanegaraan terhadap
Penghapusan *Presidential Threshold* perspektif Fiqh
Siyāsah (Studi terhadap Putusan MK No. 62/PUU-
XXII/2024)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 25 Agustus 2025
Pembimbing,



Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

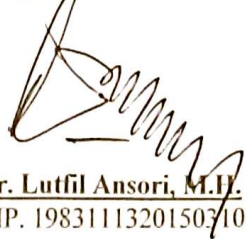
Nama : Mohamad Samsul Hadi

NIM. : 05020421045

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



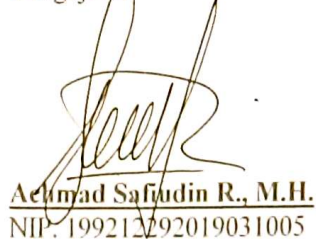
Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji II



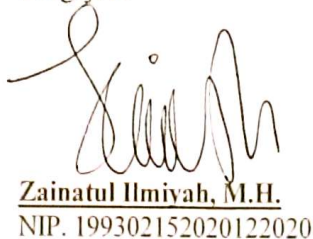
Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasvim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji III



Achmad Safudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 22 September 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saqiyah Musala'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohamad Samsul Hadi
NIM : 05020421045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : ssamsulhadi123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

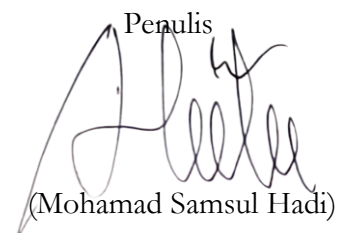
IMPLIKASI HUKUM DAN KETATANEGARAAN TERHADAP PENGHAPUSAN
PRESIDENTIAL THRESHOLD PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Terhadap Putusan
MK No. 62/PUU-XXII/2024)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Mohamad Samsul Hadi)

ABSTRAK

Judul penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang menghapuskan sistem *Presidential Threshold*. Permasalahan yang diangkat, pertama, Bagaimana implikasi hukum dan ketatanegaraan terhadap penghapusan *presidential threshold* dalam putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024? Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap implikasi hukum dan ketatanegaraan penghapusan *presidential threshold* dalam putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu langkah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), dengan bahan hukum primer atau sekunder yang dikumpulkan dari kajian kepustakaan (*library research*). Sumber bahan hukum yang ada akan dibahas dengan menggunakan teori hukum murni serta teori *fiqh siyāsah*. Hasil pembahasan dijabarkan secara sistematis untuk bisa menjawab permasalahan implikasi hukum dan ketatanegaraan dari penghapusan *presidential threshold* dalam pemilu presiden.

Berdasarkan putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, sistem ambang batas pencalonan presiden dinyatakan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pernyataan ini merupakan dasar bagi legislatif untuk merevisi Undang-Undang Pemilu agar sesuai dengan konstitusi. Dengan penghapusan ambang batas tercipta peluang terbuka dan setara bagi partai kecil dalam mencalonkan kandidat sekaligus mencerminkan prinsip demokrasi yang adil. Dalam merevisi peraturan harus mengutamakan keseimbangan pencalonan dan kelancaran pelaksanaan pemilu, karena berpotensi menimbulkan banyak calon dengan elektabilitas rendah. Kondisi ini juga memengaruhi koalisi antarpolisi, sehingga apabila presiden terpilih tidak memperoleh dukungan mayoritas di parlemen, stabilitas pemerintahan dapat terganggu. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme baru yang menjamin dukungan politik cukup di DPR agar pemerintahan presidensial berjalan efektif. Dari perspektif *fiqh siyāsah* dalam tradisi politik islam, penghapusan ambang batas pencalonan presiden didukung karena sejalan dengan prinsip musyawarah (*syura*), keadilan (*al-‘adl*), dan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*). Pembatasan ini dianggap bertentangan dengan semangat musyawarah karena menghambat partisipasi politik secara adil. Ketika hanya partai besar yang berhak mencalonkan, terjadi ketidakadilan yang merugikan hak politik rakyat karena pembatasan pilihan calon kandidat. Oleh sebab itu, penghapusan ambang batas dianggap lebih maslahat dan sesuai dengan kaidah fikih *dar’u al-maḥāsīd muqaddamun ‘alā jalbi al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan agar dalam merevisi Undang-Undang Pemilu, lembaga legislatif harus menyelaraskan aturan dengan asas pemilu dan norma hukum dalam UUD 1945, khususnya Pasal 6A ayat (2). *Presidential threshold* merupakan salah satu mekanisme untuk membatasi jumlah calon presiden yang diusung oleh partai politik. Oleh sebab itu, partai politik perlu melakukan seleksi internal yang ketat, seperti uji kelayakan dan kepatutan, guna memastikan kandidat yang diusung memiliki kualitas tinggi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Landasan Teori.....	19
H. Definisi Operasional.....	30
I. Metode Penelitian.....	32
J. Sistematika Pembahasan	36
BAB II KERANGKA TEORITIK DEMOKRASI KONSTITUSIONAL, SISTEM PEMERINTAHAN DAN <i>FIQH SIYĀSAH</i>.....	38
A. Demokrasi Konstitusional.....	38
B. Sistem Pemerintahan di Indonesia	46
C. <i>Imāmah</i>	62
D. <i>Al-Maṣlahah Al-Mursalah</i>	75
BAB III DINAMIKA PENGHAPUSAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> DI INDONESIA.....	84
A. Pengaturan <i>Presidential threshold</i> Di Indonesia	84
B. <i>Presidential threshold</i> Berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024	94
C. Implikasi Hukum Atas Penghapusan <i>Presidential threshold</i>	114
D. Implikasi Ketatanegaraan Atas Penghapusan <i>Presidential threshold</i>	118
BAB IV PENGHAPUSAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> PERSPEKTIF <i>FIQH SIYASAH</i>.....	124

A. Implikasi Hukum Dan Ketatanegaraan Penghapusan <i>Presidential threshold</i>	124
B. Pengaturan <i>Presidential threshold</i> Perspektif Fiqh Siyasah	131
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN	153
BIOGRAFI PENULIS	154



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2019.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Demokrasi Dan Nomokrasi: Persyaratan Menuju Indonesia Baru*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Konpres, 2012.
- Hidajat, Imam. *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press, 2012.
- Jazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Karso, A. Junaedi. *Buku Ajar Pemerintah Nasional*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Mahmuzar. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Prayitno, Rahadi Budi, dan Arlis Prayuga. *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tatanegara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

SKRIPSI/ARTIKEL/JURNAL

- Ansori, Lutfil. "Telaah terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (28 September 2017): 15–27.
- Barus, Tirta Yasa Agung, Rabiatul Adwiyah, Khodijah May Nuri Lubis, Suci Nur Rahma, dan M. Nadhif Faturrahman. "Mengurai Permasalahan Sistem Pemilu Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 2 (4 Desember 2024): 40–45.
- Baskoro, Aji. "Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Legislatif*, 2019, 38–56.
- Christine, Thalia, dan Ghina Salsabila Aven. "Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)." *Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta* 4 (2024).
- Erlina, Fatni. "Dinamika Sistem Pemilu Dan Demokratisasi Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi." *Kosmik Hukum* 23, no. 2 (10 Mei 2023): 200.
- Firdaus, Ilmi. "Implikasi Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Terhadap Hak Partai Politik Dan Warga Negara Dalam Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah." -. Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023. <https://digilib.uinsa.ac.id/63082/>.
- Harianja, Fices Mayasari, Dani R.Pinasang, dan Delasnova Sonya S. Lumintang. "Implementasi Pemilihan Umum Presiden Dalam Kajian Konstitusionalitas Sistem Presidensial Di Indonesia." *Lex Administratum* 12, no. 4 (6 Mei 2024).
- Hawari, Nadirsah dan Agustam. "Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah 'Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih'" 10 (1 Mei 2024).
- Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali" 2 (Februari 2018).

- Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia,. Jakarta: Rajawali Pers, t.t.
- Khoirunnisa, Shohifah. “Persyaratan Pencalonan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah: Studi Terhadap Pasal 169 Huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023. <https://digilib.uinsa.ac.id/62683/>.
- Khotimah, Nur Khusnul. “Relevansi Pemikiran Ibn Khaldun Terhadap Sistem Presidential Threshold Di Indonesia.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 3 (Juni 2024).
- Kurnia, Resti. “Analisis Yuridis Dan Siyasah Dusturiyah Terhadap Presidential Threshold Pemilu Serentak 2024.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. <https://digilib.uinsa.ac.id/56391/>.
- Kurniawan, Hendrik. “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Mekanisme Pengangkatan Anggota TNI/Polri Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil Penjabat Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. <https://digilib.uinsa.ac.id/54608/>.
- Muslim, Muhammad Huzaiifi. “Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali.” Jurnal Al-Nadhair 2, no. 1 (23 Juni 2023): 35–53.
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. Fiqh Siyasah. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Pratama, Aditya Andela, Kholifatul Muna, Zico Junius Fernando, dan Ariesta Wibisono Anditya. “Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold.” Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 5, no. 1 (25 April 2025): 73–88.
- Rahma Khofifah Khoirun Umah. “Konsep Demokrasi Konstitusional Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Masalah Mursalah.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

- Ramadhan, Farrel Ardhana. “Perbandingan Pengawasan Lembaga KPK Indonesia dengan Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi di Berbagai Negara drngan Sistem Pemerintahan Presidensial.” Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Ridwan, Ridwan. “Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dan Coattail Effect.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. <https://digilib.uinsa.ac.id/32389/>.
- Setiawan, Adjie Hari. “Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.” JAPHTN-HAN 2, no. 1 (31 Januari 2023): 169–86.
- Sholihah, Hidratus. “Penerapan Kongspe Masalah Mursalah dalam Wakaf (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.
- Supriatno, Eko, dan Achmad Rozi. “Pengaruh Penghapusan Presidential Threshold Terhadap Sistem Politik Indonesia.” Kalodran (Jurnal Ilmu Komunikasi) 3, no. 1 (16 Desember 2024): 1–9.
- Syaiful, M. “Antinomi Penerapan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden.” Jurnal Litigasi Amsir 10, no. 1 (10 November 2022): 22–29.
- Syamsuddini, M. Najich. “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif dan Inklusif).” Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim As’ary 07 (2 November 2022).

PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, t.t.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. 2025, t.t.

MAJALAH/KORAN/SURAT KABAR

gusti.grehenson. “Pakar UGM: Penghapusan Presidential Threshold jadi Langkah Maju Menuju Pemilu Demokratis.” *Universitas Gajah Mada*, 14 Januari 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-penghapusan-presidential-threshold-jadi-langkah-maju-menuju-pemilu-demokratis/>.

Liputan6.com. “Implikasi adalah: Pengertian, Jenis, dan Contoh Penerapannya.” *liputan6.com*, 31 Oktober 2024. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5755447/implikasi-adalah-pengertian-jenis-dan-contoh-penerapannya>.

Advokat Konstitusi. “Mengenal Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold.” Diakses 18 Februari 2025. <https://advokatkonstitusi.com/mengenal-parliamentary-threshold-danpresidential-threshold/>.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 27 Juli 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A